

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang serupa yaitu berkaitan dengan *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Nilai Perusahaan.

Penelitian dilakukan oleh Wijaya (2017) yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan” memiliki tujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai perusahaan yang di prosikan nilai pasar sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Selain itu, penulis juga melakukan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (size), jenis industri, profitabilitas, leverage. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menandakan bahwa para investor merespon positif *Good Corporate Governnace* dan merespon negatif pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Investor menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi.

Penelitian yang di lakukan Yulianti (2019) Penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif vervikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam peringkat II CGP, di pilih melalui purposive sampling teknik. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumnetasi dengan deskriptif teknik analisis dan uji asumsi klasik; Uji F dan Uji t. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan

terhadap nilai perusahaan, serta pengungkapan CGC dan CSR memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nurdiyana, (2016: vi) membuat sebuah penelitian. Seperangkat mekanisme tata kelola dapat digunakan untuk mencegah adanya masalah agensi. Untuk memperoleh perhatian pasar serta untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder* perusahaan menggunakan pengungkapan laporan, salah satu pengungkapan yang digunakan yaitu *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak CSR memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi.

Hanif, Wijayanti, dan Masitoh (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan dan *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan *Food And Beverage* di BEI” penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* dan statistik menggunakan analisis linier berganda. Terdapat 11 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan jangka waktu 5 tahun menghasilkan 55 sampel. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Fahmi (2016) yang berjudul Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Kualitas Pelaporan Terhadap Nilai Perusahaan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Metode yang digunakan adalah metode *sampling* dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) CG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (2) CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (3) Kualitas pelaporan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Romana (2017) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dengan *Profitabilitas* sebagai *Variabel Moderating*, pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik data Statistik Deskriptif. Sedangkan uji hipotesis menggunakan Regresi Linier, Uji  $R^2$  Uji F, dan Uji t menggunakan sektor pertambangan periode 2011-2015 yang terdaftar di BEI dengan metode *purposive sampling* menunjukkan bahwa CRS tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan *profitabilitas* tidak mampu memperkuat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, diketahui dari nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, dan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansinya. Secara simultan atau bersamaan, variabel independen CSR dan profitabilitas sebagai moderating berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan, dibuktikan dengan nilai f hitung jauh lebih besar dari f tabel.

Putra (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009- 2013). Jumlah data yang digunakan sebanyak 188. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institutional, komposisi komisaris independen dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan dan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. Namun, dalam meningkatkan nilai perusahaan akan muncul masalah kepentingan antar agen (manager) dan prinsipal (pemegang saham). Jansen dan Meckling (1976).

Sa'diyah, (2018: 63) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderating. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility* ( $X_1$ ) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Pengungkapan CSR sebuah perusahaan belum tentu dapat meningkatkan nilai perusahaannya dan

perusahaan yang tidak mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* belum tentu memiliki nilai perusahaan yang rendah. Sedangkan Profitabilitas ( $X_2$ ), tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Bahwa dengan profitabilitas perusahaan yang meningkat namun perusahaan tidak mampu memberikan kemakmuran kepada pemegang saham sehingga manajemen tidak berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini variabel Moderating ialah Profitabilitas ( $X_m$ ) mampu mempengaruhi interaksi antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan, dengan kata lain *Corporate Social Responsibility* dapat meningkatkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan tinggi, dan sebaliknya CSR dapat menurunkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan rendah.

Fallatah dan Dickins (2012) jurnal arab yang sudah diterjemahkan melakukan penelitian studinya menyelidiki hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan yang terdaftar di Saudi menggunakan indeks yang di maksudkan untuk menangkap efek gabungan dari karakteristik tata kelola perusahaan. Pentingnya Arab Saudi sebagai pasar internasional untuk investasi sedang tumbuh. Dipengaruhi oleh kebaruan inisiatif tata kelola dan persentase besar kepemilikan orang dalam, kami memperkirakan dan menemukan bahwa tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan (diukur sebagai pengembalian ase) tidak terkait, tetapi tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan (diukur sebagai Tobin's Q dan Nilai pasar ekuitas) berhubungan positif).

Gherghina dan Vintila (2016) Jurnal Romania yang sudah di terjemahkan dalam penelitiannya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menyoroti reaksi terhadap tekanan sosial, masing-masing jawaban atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebutuhan sosial yang menggambarkan dimensinya. Makalah kami bertujuan untuk memberikan bukti tentang hubungan anatar CSR dan nilai perusahaan pada contoh perusahaan yang terdaftar di Rumania. Pentingnya penelitian ini muncul dengan tujuan untuk memperkuat tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi dalam bisnis dan dampak penting dari perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kuesioner kebijakan CSR multidimensi, kami mengembangkan indeks global CSR, serta empat

subindeks tentang keterlibatan sosial, karyawan, produk, dan layanan, perlindungan lingkungan baik bobot setara, maupun bobot pemangku kepentingan. Nilai perusahaan diproksikan dengan rasio Tobin'Q yang disesuaikan dengan sektor aktivitas. Berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan, kami menemukan dampak positif dari indeks CSR global dan subindeks CSR terhadap kualitas, keamanan, dan epektifitas yang terkait dengan produk dan layanan, pada nilai perusahaan. Selain itu, beberapa ukuran CSR agregat berbeda secara signifikan untuk emiten di lapis pertama dan emiten di lapis kedua.

Jurnal Korea terjemahan yang ditulis Machmuddah, et al, (2020) meneliti tentang “*Corporate Social Responsibility, Profitability, and Firm Value: Evidence from Indonesia*” untuk mengidentifikasi efek dari Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data yang didasarkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017 dianggap sebagai populasi penelitian ini. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Berikut adalah kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini 1) mempublikasikan keberlanjutan laporan dengan menggunakan standar GRI G4 sebagai acuan dalam penyusunan laporan tahun 2013-2016, 2) mempublikasikan laporan keuangan lengkap tahun 2014- periode pengamatan 2017, 3) tidak mengalami kerugian selama periode 2014-2017. Jumlah sampel penelitian adalah 109 perusahaan. pembelajaran menggunakan analisis jalur berbantuan software WarpPLS versi 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan *profitabilitas* memoderasi pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan. implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Pristiananingrum, (2017) melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh Ukuran, *Profitabilitas*, Dan Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan

pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; (2) variabel profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan; (3) variabel pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ; dan (4) secara keseluruhan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pengungkapan CSR berpengaruh secara bersama sama terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Amaliyah dan Herwiyanti (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan”. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian korelasional, dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website data BEI. Sampel yang digunakan berjumlah 60 perusahaan sektor pertambangan selama 2 tahun periode pengamatan. Teknik pengambilan sampel di lakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat analisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Simpulan dari penelitian ini adalah keberadaan komite audit mempunyai peran yang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui kualitas komite audit. Sedangkan untuk kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Azis (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2010-2014)”. Dalam penelitian ini menggunakan indikator kepemilikan manjerial dan kepemilikan institusional. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) CG tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) CG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur oleh ROA, (3) Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (4) CG tidak mempengaruhi nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya kinerja keuangan yang tinggi dapat memberikan nilai tambah kepada nilai perusahaannya, yang tercermin dengan meningkatnya nilai PBV.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 *Good Corporate Governance***

*Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* (2006) dalam Putra (2016) menjelaskan bahwa pemegang sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan anggaran dasar perusahaan. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas keadilan dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan anggaran dasar perusahaan. Pemegang saham dalam perusahaan antara lain pihak manajemen dan pihak institusi yang memiliki saham perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) mengatakan: “Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan “*stakeholder*” lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, *Corporate Governance* di definisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama yaitu mengelola risiko yang signifikan dan bertujuan untuk memenuhi

bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Febriyanto, 2013: 22) dalam Margareth, (2018: 10). *Corporate governance* adalah suatu sistem yang berfungsi mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham.

Yang memperkenalkan istilah “*Corporate Governance*” adalah Cadbury Communitte dan di negara Inggris pada tahun 1992, dalam di laporannya tersebut menggunakan istilah Cadbury Report. Cadbury Comunittee of United Kingdom dalam Agoes dan Ardana (2013: 101) definisi *good corporate governance* adalah “*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled*”.

Wijaya, (2017: 8) *Center for European Policy Studies* (CEPS), punya formula lain GCG, papar pusat studi ini, merupakan seluruh yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan. sebagai catatan, hak disini adalah hak seluruh *stakeholders*, bukan terbatas kepada *shareholders* saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan. sementara itu , ADB (*Asian Development Bank*) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: *accountability, transparency, predictability, dan participation*.

Suatu sistem yang tujuannya untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (*stakeholder*) adalah definisi *Corporate Governance*



menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dalam NurAini dan Cahyonowati, (2017: 8).

Dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 definisi *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholder*. Secara teoritis, pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dapat dilakukan oleh dewan komisaris dengan beberapa keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan pada umumnya *good corporate governance* dapat pula meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, et al., 2003) dalam Margareth (2018). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep *Good Corporate Governance*, yaitu:

- a) Betapa pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu.
- b) Perusahaan berkewajiban untuk melakukan penggunaan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

### **2.2.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan dapat menjadi titik rujukan bagi para pemerintah dalam membangun *framework* untuk penerapan *good corporate governance* di dalam perusahaan. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman untuk peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan informasi)

Keterbukaan dalam melakukan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

### 2.2.3 Teori Stakeholder

Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memiliki *stakeholder* ini kemungkinan menjadi hal yang banyak di bicarakan dalam literatur-literatur manajemen baik akademis maupun profesional. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai *stakeholder* adalah *strategic Management: A Stakeholder Approach* oleh Freeman 1984 dalam Puji (2018).

Menurut Jones (1995) dalam Yohana (2018) mengklasifikan *stakeholder* menjadi dua jenis:

1. *Inside Stakeholder*, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholder adalah pemegang saham (*shareholder*), para manajer (*managers*) dan karyawan (*employess*).

2. *Outside stakeholder*, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan di pengaruhi oleh keputusan perusahaan.

Untuk pelanggan (*customer*), pemasok (*supplier*), pemerintah (*governance*), masyarakat secara umum (*general public*) dan masyarakat lokal (*local communities*) adalah jenis kategori *outside stakeholder*.

Ghozali dan Chairi, (2007:409) Kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung pada dukungan para *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktifitas perusahaan adalah mencari dukungan *stakeholder*. Dukungan *stakeholder* bisa diperoleh apabila pihak manajemen atau agent memberikan informasi yang lebih baik untuk mencari perhatian para *stakeholder* (khususnya investor), dalam hal ini komisaris independen berperan untuk mengawasi kinerja pihak manajemen.

#### **2.2.4 Teori Keagenan (*Agency Teory*)**

Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara shareholder dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan Meckling, 1976).

Mendefinisikan hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa, dan dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agent tersebut. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu baik agent maupun principal semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Anthony dan Govindarajan (2005: 269) dalam Fadhil (2016). Dari sudut pandang manajemen keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Tujuan itu seringkali hanya

bisa tercapai apabila tanggungjawab pengelolaan perusahaan diserahkan kepada para profesional, dikarenakan para pemilik modal memiliki keterbatasan. Dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para profesional, diharapkan mereka dapat menutupi keterbatasan yang ada. Para profesional ini disebut sebagai agent atau manajer. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan untuk membuat keputusan dan ini yang seringkali menimbulkan atas kepentingan yang disebut teori agensi (*agency theory*). Ardianingsih dan Ardiyani (2016).

Muliani, dkk (2019) Teori keagenan, dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan atau perilaku karena pada dasarnya antara agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan (*agent conflict*).

Menurut Brigham dan Houston 2006 dalam Wijaya (2017) para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dan hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai konflik keagenan. Teori agency menurut Mardiyanto (2009) dalam Wijaya (2017) akan menjelaskan ketidaksiharan kepentingan antar pemilik perusahaan dan kreditor.

Teori agensi menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Jensen dan Mackling menyatakan hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Jansen dan Mackling 1976, *Thory of firm: managerial behaviour, agency cost anf ownership structure*) dalam Rokhlinasari (2016).

### **2.2.5 Mekanisme Corporate Governance**

Mekanisme adalah cara kerja atau metode yang digunakan beberapa orang untuk melakukan proses kegiatan yang menggunakan aturan dan serta adanya alur komunikasi serta pembagian tugas sesuai dengan profesional untuk mencapai suatu tujuan. Mekanisme corporate governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas anatar pihak yang mengambil keputusan

dengan pihak melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Gillan (2006: 385) dalam Sulasri, Sarita, dkk (2019: 93) mekanisme dapat dibedakan menjadi dua yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal.

Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, dewan komisaris independen dan pertemuan dengan board of director. Kualitas mekanisme internal secara luas berhubungan dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. Cara selain mekanisme internal untuk mempengaruhi perusahaan untuk mengadakan oleh perusahaan, perusahaan juga melakukan pengendalian oleh pasar yang biasa disebut mekanisme eksternal. Gillan (2014) dalam Sulasri, Sarita, dkk (2019: 93) menjelaskan bahwa mekanisme ini berada didalam perusahaan, dan berasal dari dua belah pihak.

Menurut Tunggal (2013) dalam Sahara (2019) unsur-unsur Corporate Governance terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional.

#### **2.2.5.1 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Dewi dan Abunsdanti (2019:6105).

Gillan (2014) dalam Sulasri, Sarita, dkk (2019). Pengertian kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh investor yang berasal dari pihak institusi perusahaan. kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan. Salah satu pemegang saham dalam perusahaan adalah institusi Putra (2016). Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) Sari dan Ridwan (2013) dalam Hanif, dkk (2019: 50).

Tingkat kepemikiran institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer Muliani, dkk (2019). Untuk meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer sangat diperlukan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan. sehingga manajemen merasa terdorong untuk memberikan informasi pengungkapan dengan tepat waktu agar terhindar dari kurangnya relevansi informasi itu sendiri.

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan mempunyai keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Pertama, dengan adanya kepemilikan institusional, perusahaan memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. Pengungkapan informasi oleh manajemen cenderung akan dilakukan secara luas. Kedua, dengan adanya investor institusional, perusahaan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan Sari, dkk (2013) dalam Muliani, dkk (2019).

Naik turunnya nilai perusahaan san untuk mengurangi agency cost di pengaruhi oleh struktur kepemilikan, diantaranya dengan kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional. Azis (2016: 9).

#### **2.2.5.2 Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran Dewan Komisaris (UDK) dapat dilihat dari karakteristik dewan salah satunya adalah komposisi keanggotaanya. Efektivitas fungsi pengawasan dewan tercermin dari komposisinya apakah pengangkatan anggota dewan berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen dan memberikan nasehat kepada manajemen jika

dipandang perlu oleh dewan komisaris sehingga dewan komisaris dianggap berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan.

### **2.2.5.3 Ukuran Komite Audit**

Sebuah komite audit merupakan solusi tepat untuk menhurangi biaya keagenan sesuai dengan pernyataan Alchain dan Demstz dalam Kusuma (2012:5) yang menyatakan bahwa teori keagenan mengemukakan moral hazard yang melekat dalam prinsipal dan agn dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Sehingga dengan adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang tealh diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.SE0008/BEJ/12-2001 tanggal 07 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

- a. Jumlah anggota komite audit sukurang-kurangnya 3 orang, termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit berasal dari komisaris, hanya sebanyak 1 orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
- b. Anggota lainnya dari komite audit berasal dri pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan independen adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesioanl secaa bebas sesuai dengan etika profesioanlnya, tidak memiliki kepentingan kepada siapapun.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (*Bradbury, et al. 2004: 4*). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang

diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen,, auditor eksternal, dan auditor internal. Adanya komunikasi antara komite audit, auditor internal, dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (*Anderson et al.* 2003 : 5).

### **2.2.6 Corporate Social Responsibility**

Menurut *Bertens K* (2004 : 133) tanggung jawab (*Responsibility*) berarti suatu keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya secara retrospektif dan prospektif. Sementara itu, *Kast* (2003:212) mendefinisikan tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) sebagai bentuk keterlibatan suatu organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.

*The World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Menurut lingkaran studi *Corporate Social Responsibility* Indonesia adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Puspaningrum, 2014:18).

Friedman (Eko Andy Kurnianto, 2011:28) menyatakan bahwa tujuan utama *Corporate Social Responsibility* adalah memperoleh profit semata semakin



ditinggalkan. Sebaliknya konsep triple bottom line (profit, planet, people) yang digagas oleh John Elkington mekan masuk kedalam mainstream etika bisnis.

*Corporate Social Responsibility* bukan hanya kegiatan kurikatif perusahaan dan kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lebih dari itu *Corporate Social Responsibility* diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda dan cara pandang yang berbeda terhadap perusahaan. Sepuluh pihak yang dimaksud adalah *stakeholder, creditors, employess, cutomers, suppliers, goverments, unions, competitor, local communities and general public*.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam konteks pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*). *Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi ACCA (Puspaningrum, 2014 :39).

#### **2.2.6.1 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Ghozali dan Chariri dalam Hakim, 2016:19). Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2005 dalam Hakim 2016:19).

Upaya pelaporan atau pengungkapan ini diharapkan berbagai pihak dapat turut serta memantau implementasi tanggung jawab sosial terhadap institusi dan *stakeholder* yang terkena dampak beroperasinya perusahaan tersebut. Upaya pengungkapan ini dikenal dengan *Global Reporting Initiative* (GRI). Laporan tersebut menceritakan tentang kegiatan perusahaan yang didalamnya memuat aktivitas *Social Responsibility* untuk disampaikan kepada publik. Di Indonesia himbauan untuk pengungkapan implementasi CSR dimuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas pada pasal 66 ayat (2) huruf C, bahwa salah satu muatan laporan tahunan adalah laporan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan (Haryati, 2013 dalam Herdiansyah, 2017:18). Standar yang mengacu pada *Global Reporting Index* dari *Global Reporting Initiative* membagi indikator kinerja mejadi tiga komponen utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang menyangkut hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, masyarakat dan tanggung jawab produk.

### **2.2.7 Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai perusahaan sangat penting adanya hal ini dikarenakan dengan nilai perusahaan yang tinggi maka akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Gapenski, 1996 dalam Anggitasari 2015:34). Nilai perusahaan yang tinggi merupakan keinginan para pemilik perusahaan, karena dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham yang tinggi. Nilai perusahaan lazim di indikasikan dengan *price to book value*. *price to book value* yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan dimasa depan. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan dan manajemen aset.

Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, Karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang tetapi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan pun akan meningkat.

Sukamulja (2004:22) dalam Yulia (2016:15) Menyatakan bahwa salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik adalah Tobin's Q, karena rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan,

seperti misalnya terjadinya perbedaan *cross-sectional* dalam pengambilan keputusan investasi serta hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan.

Tobin's Q memasukan semua unsur hutang dan model saham perusahaan, tidak hanya unsur saham biasa. Perusahaan dengan Tobin's Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat. Perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor saja, namun juga kreditur. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur menunjukkan bahwa perusahaan semakin tinggi kepercayaan yang di berikan, hal ini menunjukkan perusahaan memiliki perusahaan yang lebih besar.

Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkayan pemilik atau para pemegang saham. (Gapensi, 1996) dalam Wahidwati, (2002).

## **2.2.8 Pengaruh Antar Variabel**

### **2.2.8.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan**

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang tidak mempunyai ikatan bisnis atau hubungan keluarga dengan pemegang saham maupun direksi. Komisaris independen juga dapat di gunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer. Dewan komisaris adalah inti dari *Good Corporate* yang bertugas untuk menjamin strategi perusahaan, untuk melakukan pengawasan terhadap manajer, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam perusahaan. (Purwaningtyas, 2011) dalam Damaianti (2019: 115).

### **2.2.8.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan**

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensi dari manajemen. Dalam lampiran

surat keputusan dewan direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-200 point 2f, peraturan tentang pembentukan komite audit disebutkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Jika kualitas dan karakteristik komite audit tercapai maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut.

Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi.

### **2.2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan**

Investor institusional merupakan pihak yang dapat bertindak sebagai pengawas perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional di dalam perusahaan maka pemnafaatan aktiva perusahaan menjadi efisien dan dapat mencegah pemborosan yang dilakukan oleh manajemen Melisa (2015).

Slovin dan Sushka dalam Melisa (2015:28) berpendapat bahwa nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif, hal ini menunjukkan bahwa dalam kepemilikan saham dibutuhkan kepemilikan mayoritas yang independem dengan manajemen, sehingga aktivitas manajemen dalam meningkatkan nilai

perusahaan yang merupakan kesejahteraan pemegang saham dapat tercapai.

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Purwaningtiyas (2011:23) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manager dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Putri (2012:32) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik kinerja perusahaan, serta mempunyai kemampuan untuk mengontrol kinerja perusahaan sehingga semakin hati-hati manajemen dalam menjalankan perusahaan.

#### **2.2.8.4 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan**

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak social dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat. Kewajiban perusahaan atas CSR di atur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini di maksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma. dan budaya masyarakat setempat.

Matthew Brine (2008) dalam Firmansyah dan Suransi, (2019 : 171) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan. Hal ini di karenakan dalam pengambilan keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai masalah sosial dan lingkungan jika perusahaan ingin

memaksimalkan hasil keuangan jangka panjang yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Subardjo (2020: 7) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang di arahkan untuk meningkatkan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar sekitar dan masyarakat secara lebih luas. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki potensi untuk meningkatkan legitimasi pihak eksternal agar mampu menilai seberapa besar upaya aktivitas operasional yang sesuai dengan norma di masyarakat. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga adalah strategi aktif perusahaan untuk meningkatkan kepuasan stakeholder. Semakin banyak pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), semakin transparan dan lengkap informasi yang di berikan sehingga mampu memperoleh sinyal positif bagi investor. Ketiga hal tersebut memberikan citra perusahaan yang baik sehingga investor tertarik untuk menanamkan sahamnya di perusahaan.

Anwar *et al.* (2010: 18) dalam Margareth (2018: 27) menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunan (annual report) memperkuat citra perusahaan dan menjadisebagai salah satu pertimbangan yang di perhatikan investor untuk memilih tempat investasi karena menganggap bahwa perusahaan tidak lagi hanya mengejar profit semata tetapi sudah memperhatikan lingkungan dan masyarakat.

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis yang dapat dirumuskan kedalam penelitian adalah Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Corporate Social Responsibility, Terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur (sektor konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut Rincian Hipotesis statistik yang akan di uji :

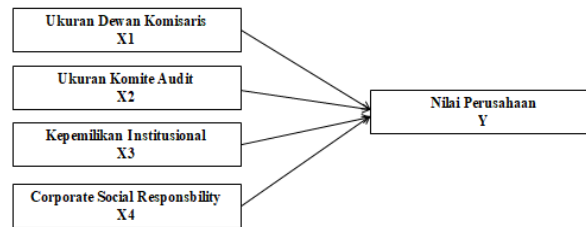
H<sub>1</sub> : Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan.

H<sub>2</sub> : Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan.

H<sub>3</sub> : Pengaruh Kepemilikan Instiusional terhadap Nilai Perusahaan.

H<sub>4</sub> : Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan

#### 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Peneliti